

Kewajiban Front Persatuan Buruh

Resolusi Central Komite Partai Komunis Indonesia
(Penerbit Jajasan "Pembaruan" Djakarta)

KATA PENGANTAR

Sesudah beberapa kali ada diusulkan kepada Jajasan "PEMBARUAN" untuk menerbitkan Resolusi CC PKI: "**Kewajiban Front Persatuan Buruh**", sebagai brosur. Pada mulanja kami merasa bimbang untuk menerbitkannya, karena menduga, bahwa Resolusi CC PKI ini tentunja sudah diperbanjak oleh organisasi-organisasi Partai didaerah. Tetapi sekarang ternyata desakan jang keras kepada kami untuk menerbitkannya tidak sadja datang dari organisasi-organisasi Partai didaerah, tetapi djuga dari kalangan umum diluar PKI.

Disamping itu, pengalaman menundjukkan bahwa kaum buruh biasa jang sudah memahami isi "**Kewajiban Front Persatuan Buruh**" ini mendjadi lebih yakin akan kebenaran tuntutan² dan aksi²nja selama ini, dan bisa menjangkal keterangan-keterangan jang menjesatkan jang bertudjuan memfitnah gerakan klas buruh pada umumnja.

Atas dorongan perrnintaan dan kesedaran akan pentingnja "**Kewajiban Front Persatuan Buruh**" ini bagi kaum buruh umumnja, maka kami-terbitkan ia sebagai brosur, dengan pengharapan akan betul² mendjadi sendjata bagi setiap buruh didalam perdjuangannya sehari-hari.

Penerbit.

Djakarta, Djuli 1952.

I S I

- I. Sepintas Lalu Tentang Keadaan Ekonomi Dan Politik Indonesia
- II. Keterangan Kita Tentang “Pembangunan Nasional” Dan Nasionalisasi Perusahaan² Vital
- III. Keterangan Kita Tentang Kenaikan Harga Barang Dan Inflasi
- IV. Program Demokrasi Rakjat Dan Pengusaha Nasional
- V. Soal Serikatburuh-I Reaksioner Dan Arbitrasi Pemerintah
- VI. Front Buruh Dengan Kemerdekaan Nasional Dan Perdamaian

I. Sepintas Lalu Tentang Keadaan Ekonomi Dan Politik Indonesia

Untuk menetapkan apakah kewadajiban front buruh Indonesia di-tengah² perdjungan seluruh Rakjat Indonesia untuk mentjapai perbaikan nasib, mentjapai kemerdekaan nasional dan untuk mendjamin perdamaian dunia jang abadi, tidak bisa dipisahkan daripada menindjau hubungannja dengan keadaan ekonomi dan politik Indonesia dewasa ini.

Dizaman pendjadjahan Belanda ekonomi Indonesia adalah ekonomi kolonial. Ini berarti bahwa kedudukan ekonomi Indonesia ketika itu jalah: 1) sebagai sumber bahan mentah; 2) sebagai sumber tenaga buruh jang murah; 3) sebagai pasar buat mendjual hasil² produksi negeri² kapitalis; 4) sebagai tempat Investasi (penanaman) modal asing. Ini berarti bahwa Indonesia tergantung dari export bahan² mentah (timah, bauxiet, karet, dll. Hasil perkebunan, dsb.) dan import barang keperluan hidup (textil, sepatu, sepeda, dsb.).

Susunan ekonomi kolonial mengakibatkan Indonesia tidak mempunjai industri sendiri jang bisa mengerdjakan bahan mentahnja guna memenuhi kebutuhan Indonesia. Ini berarti bahwa dilapangan ekonomi Indonesia tergantung dari luar negeri, dan dengan demikian tidak mungkin ada perkembangan modal nasional dan industri nasional.

Ekonomi kolonial ini dipertahankan oleh imperialis Belanda dengan

Kewajiban Front Persatuan Buruh

bantuan penanam modal asing lainnya di Indonesia dengan suatu politik kolonial yang dalam praktiknya bersifat setengah-fasis. Politik kolonial ini ditujukan untuk menindas gerakan Rakyat yang menuntut kemerdekaan sebagai jaminan guna penjurusan ekonomi nasional. Terutama gerakan buruh dan Partai Komunis Indonesia, sebagai partainya kelas buruh, mendapat rintangan yang paling besar dari pemerintah kolonial. Bagi pemimpin² gerakan melawan imperialis Belanda disediakan rumah penjara dan konsentrasikamp Digul.

Menurut perhitungan tahun 1930 (statistik Hindia Belanda), penduduk Indonesia yang hidup dari upah berjumlah lebih kurang 6.000.000 (enam juta). Dalam jumlah ini sudah dimasukkan buruh musiman (*seizoen arbeiders*) yang sangat besar jumlahnya dan bekerja di-perkebunan² atau di-pabrik² gula. Buruh musiman ini umumnya terdiri dari buruh tani dan tani miskin, yaitu penduduk desa yang samasekali tidak mempunyai tanah garapan atau mempunyai tanah tetapi sangat sedikit. Diantara 6 juta kaum buruh itu, antara lain terdapat setengah juta buruh modern terdiri dari: 316.200 buruh transport 153.100 buruh pabrik dan bengkel, 36.400 buruh tambang timah kepunjaan pemerintah dan partikular, 17.100 buruh tambang batubara kepunjaan pemerintah dan partikular, 29.000 buruh tambang minyak, 6.000 buruh tambang emas dan perak kepunjaan pemerintah dan partikular. Selainnya adalah buruh pabrik gula, buruh perkebunan, berbagai golongan pegawai negeri (termasuk polisi dan tentara), buruh industri kecil, buruh lepas dsb. Perlu diterangkan bahwa yang terbesar ialah jumlah buruh industri kecil (2.208.900) dan buruh lepas (2.003.200). Dari angka² ini jelaslah bagi kita, bahwa baru bagian yang sangat kecil dari buruh Indonesia (setengah juta) yang sudah berhubungan dengan alat² produksi modern, sedangkan bagian terbesar belum berhubungan dengan alat² produksi modern dan masih erat hubungannya dengan pertanian.

Pemerintah Hindia Belanda telah sangat menekan perkembangan gerakan buruh. Ini kelihatan antara lain dari kenyataan sbb.: statistik tahun 1940 menunjukkan, bahwa dari ber-juta² kaum

buruh Indonesia hanya 110.370 yang terorganisasi (dalam 77 serikat buruh). Politik memetjah dari kaum reaksi ketika itu kelihatan dari kenjataan, bahwa 77 serikatburuh yang ada itu tergabung dalam 11 gabungan serikatburuh. Umumnya serikatburuh dan gabungan serikat buruh ini adalah dibawah pimpinan kaum reformis dan reaksioner. Oleh karena itu tidak mengherankan, bahwa menurut kantor urusan perburuhan Hindia Belanda dalam tahun 1940 hanya terdjadi pemogokan di 42 perusahaan (diantaranya 30 perusahaan tekstil di Djawa Barat) dan hanya diikuti oleh 2.115 kaum buruh. Sedangkan djumlah buruh dari 42 perusahaan itu ada 7.949. Pemogokan² ini tidak besar akibatnja bagi madjikan, ia hanya berakibat hilangnya 32 hari kerdja. Tetapi, tidak adanya aksi² kaum buruh setjara besar²an sama sekali tidak berarti bahwa tindasan terhadap Rakjat dan kaum buruh Indonesia ketika itu kurang kedjam. Kekedjaman terhadap kaum buruh antara lain kelihatan dari upah buruh yang sangat rendah dan perlakuan sewenang² dari madjikan. Menurut statistik tahun 1940 tertjat, bahwa rata² upah buruh pabrik gula Rp. 0.28 sehari buat laki² dan Rp. 0.23 sehari buat perempuan. Dalam tahun 1940 tertjat 407 pengaduan kaum buruh yang dapat pukulan dari administratur, asisten² dan mandor² perkebunan. Kedjengkelan yang sudah tidak tertahan lagi dari buruh perkebunan dinjatakan dengan adanya serangan² buruh perkebunan pada pengawas² perkebunan. Demikianlah dalam tahun 1940 telah tertjat 51 serangan buruh perkebunan atas pengawas² perkebunan, dimana 2 pengawas tewas karena serangan tersebut.

Tindasan Belanda terhadap seluruh Rakjat Indonesia, yang kemudian dilakukan dengan lebih kedjam lagi oleh fasisme Djepang, telah membangunkan seluruh Rakjat untuk berdjuang ber-sama² guna menggulingkan kekuasaan kolonial dan fasis. Salah satu puntjak dari perlawanan Rakjat ialah Revolusi Rakjat tahun 1945. Revolusi ini meletus dengan tudjuan yang positif dari Rakjat Indonesia, jaitu dengan tudjuan agar Indonesia mendjadi negara yang benar² merdeka, dimana ekonominja tidak tergantung dari luar negeri, dimana industri nasional bisa berkembang sebagai

Kewadajiban Front Persatuan Buruh

sjarat terpenting bagi kemakmuran seluruh Rakjat, dimana nasib Rakjat banjak jang tjelaka bisa mendjadi baik dan dimana kemerdekaan politik didjamin sepenuhnya bagi seluruh Rakjat.

Tudjuan positif dari Revolusi Rakjat tahun 1945 menemui djalan buntu setelah oleh pemerintah Indonesia (kabinet Hatta) diadakan persetudjuan dengan pemerintah Belanda, jaitu persetudjuan Konferensi Medja Bundar (KMB), pada permulaan tahun 1950. Revolusi Rakjat (1945-1948) telah melemparkan beban kolonial dari pundak Rakjat, sebaliknya persetudjuan KMB telah merestorasi (menghidupkan kembali) susunan ekonomi kolonial di Indonesia. Memang dengan persetudjuan KMB diseluruh Indonesia, ketjuali di Irian Barat, sekarang sudah dibentuk suatu pemerintah dan alat² negara jang pimpinannja dipegang oleh orang² Indonesia, tetapi ini sama sekali tidak berarti bahwa beban kolonial jang lama sudah lepas dari pundak Rakjat Indonesia. Oleh karena itu, persetudjuan KMB (atau persetudjuan² lain jang isinja sama dengan persetudjuan KMB) tidak lain daripada kolonialisme dengan badju baru.

Persetudjuan KMB telah mewadajiban Rakjat Indonesia membajar hutang jang sangat berat Bulan Djanuari 1950 hutang tsb. berdjumlah lebih dari 4 miljard, dan dalam bulan Djanuari 1951 djurnlah hutang seluruhnja mendjadi lebih dari 6 miljard. Djadi dalam satu tahun hutang sudah bertambah dengan 2 miljard. Persetudjuan KMB telah mengembalikan semua pabrik², perkebunan², tambang² dan tjabang² industri vital lainnja kepada pemiliknja jang lama, jaitu modal besar asing. Ini berarti bahwa sumber² pokok dari kekajaan Indonesia tidak masuk kas negara, tetapi ditumpuk oleh modal besar asing dan diangkut keluar negeri. Sebagai tjontoh, menurut laporan Mr. Teuku Hassan, Ketua seksi perekonomian parlemen Sementara RI (1951), bukti² menundjukkan bahwa dari pertambangan minjak sadja kekajaan Indonesia dikuras, berupa keuntungan jang terang, oleh BPM dan kongsi² minjak lainnja sedjumlah Rp. 4.000.000.000. (empat mljard) saban tahun, jang berarti Indonesia kehilangan kira² hampir sama dengan 50 % dari anggaran belandja negara untuk

satu tahun. Atau djika kehilangan kekajaan ini kita bagi rata diantara Rakjat Indonesia (75 djuta), maka berartilah bahwa oleh pertambangan minjak sadja dari seup orang, mulai dari baji sampai orang² tua, telah ditjuri kekajaan sebesar kira2 Rp. 53,-. Djika kehilangan kekajaan ini kita bagi rata diantara kaum buruh Indonesia (6 djuta), maka berartilah bahwa oleh pertambangan minjak sadja dari setiap buruh telah ditjuri kekajaan sebesar Rp. 4.000.000.000,- : 6.000.000, atau Rp. 667.-. Menurut peraturan pertambangan kolonial jang hingga sekarang masih berlaku, Indonesia mendapat penghasilan dari hak tetap, bea export, accijns, dan padjak NV atas kongsi² minjak hanja sebanjak Rp. 315 djuta, djadi tidak sampai ... 10% dari keuntungan jang terang. Pengembalian kepada modal besar asing ini berlaku djuga untuk tanah² jang sudah diduduki oleh kaum tani selama revolusi.

Politik jang didjalankan oleh pemerintah sekarang jalah politik jang mengembalikan kedudukan ekonomi Indonesia sebagai kedudukan dizaman djadjahan, jaitu kedudukan sebagai sumber bahan mentah, sebagai sumber tenaga buruh jang murah, sebagai pasar dan sebagai tempat penanaman modal. Dalam keadaan politik sekarang kedudukan ekonomi Indonesia, dibanding dengan zaman pendjadjahan Belanda, lebih tergantung dari luar negeri. Kedudukan ekonomi Indonesia sekarang begitu tergantungnja sehingga praktis pemerintah Indonesia sekarang diinstruksi oleh kekuasaan asing (Amerika) dari mana Indonesia mesti membeli sesuatu barang dan kemana Indonesia boleh mendjual barangnja (misalnja dengan adanja pindjaman Eximbank, adanja Embargo, Frisco, MSA, dsb.). Berangsur² dan makin lama makin njata, dalam persiapan perang dunia oleh Amerika sekarang, Indonesia didjadikan salah satu sumber ekonomi perang jang terpenting. Keadaan² ini pula jang membikin Indonesia makin lama makin dalam masuk perangkap politik perang Amerika, jang membikin Indonesia tidak hanja tergantung dalam soal ekonomi, tetapi djuga mendapat instruksi² politik dan militer dari Belanda dan Amerika (Univerband, Irian, Nederlands Militaire Missie, pangkalan² perang, Eximbank, Embargo, Frisco, MSA, dsb.).

Kewadajiban Front Persatuan Buruh

Akibat dari politik pemerintah yang menggantungkan diri pada luar negeri ini, teranglah bahwa stabilisasi ekonomi tidak mungkin tertjapai. Industrialisasi tidak mungkin didjalankan dan modal nasional tidak mungkin dibangun karena ini bertentangan dengan kepentingan modal besar asing. industrialisasi dan pembangunan modal nasional di Indonesia adalah merupakan saingan bagi industri dan modal dari negeri² penanam modal. Industrialisasi dan pembangunan modal nasional adalah bertentangan dengan kepentingan ekonomi perang dari negeri² imperialis. Kaum buruh dan kaum tani yang merupakan lebih dari 80% Rakjat Indonesia, dan yang merupakan tenaga produktif dan konsumen yang terbesar, praktis tak mengalami perbaikan didalam hidupnja, artinja tenaga produktifnja maupun kekuatan membelinja tidak bertambah.

Walaupun bagaimana, selama pemerintah Indonesia masih mendjalankan politik yang menggantungkan diri pada negeri² penanam modal besar asing seperti Belanda, Amerika dan Inggris, pemerintah Indonesia tetap akan mendjalankan ekonomi export dan import yang dulu dilakukan oleh Hindia Belanda, jaitu ekonomi yang terus-menerus diombang-ambingkan oleh konjungtur (turun-naiknja keadaan) dan pasar dunia yang dikuasai oleh dollar dan sterling. Pemerintah yang demikian sudah tentu tidak akan mungkin membangunkan dan menjelamatkan ekonomi nasional yang merdeka, sebagai djaminan pokok untuk kemerdekaan nasional yang sedjati.

Untuk memperbaiki nasibnja yang buruk Rakjat Indonesia, terutama kaum buruh dan kaum tani Indonesia, telah mengadakan tuntutan² dan aksi² terhadap madjikan modal besar asing dan terhadap pemerintah "nasional". Aksi² kaum buruh seperti pemogokan² buruh perkebunan, buruh kendaraan bermotor, buruh pertjetakan, buruh minjak, buruh daerah otonomi, dll. Telah memberi dorongan dan keberanian pada golongan² lain dari Rakjat untuk djuga bangun dan berdjuang membela nasibnja. Diberbagai tempat aksi² kaum tani mendapat sukses² yang menimbulkan kegembiraan berdjuang pada massa kaum tani. Di-mana², tumbuh kekuatan Rakjat dalam melawan ofensif reaksi yang ganas. Kaum buruh senantiasa

mendjadi pelopor dan pemberi inspirasi dalam tiap² perlawanan. Disinilah pentingnja kedudukan front buruh sebagai bagian jang paling madju dan paling konsekwen daripada seluruh front persatuan nasional Rakjat Indonesia.

II. Keterangan Kita Tentang “Pembangunan Nasional” Dan Nasionalisasi Perusahaan² Vital

Dengan adanja persetujuan KMB modal besar asing mendapat bantuan jang sangat besar dari suatu pemerintah “nasional” jang bisa digunakan untuk menutupi exploitasi atas kekajaan alam dan Rakjat Indonesia dengan sembojan² “nasional”.

Pemerintah dan madjikan modal besar asing berusaha mengabui mata Rakjat dengan omongan² tentang “pembangunan nasional”. Dengan sembojan “pembangunan nasional” mereka mengadakan ofensif ekonomi terhadap klas buruh. Mereka katakan, bahwa kekurangan barang jang diderita Rakjat sekarang, bahwa harga mahal jang mesti dibayar oleh Rakjat dan bahwa bahaja inflasi, adalah karena aksi² kaum buruh. Mereka tuduh kaum buruh anasional (tidak bersifat nasional), mereka tuduh massa kaum buruh sebagai “komunis” dan sebagai tukang “main politik”, mereka tuduh kaum buruh sebagai alat “kekuasaan asing”, sebagai alat “Moskow”, alat “RRT”, dan sebagainya. Pemerintah dan madjikan modal besar asing mempermainkan sentimen dan belum mengertinja klas-tengah (kaum pengusaha nasional) dengan, menerangkan, bahwa tindakan² jang diambil oleh pemerintah terhadap kaum buruh dan Rakjat umumnja, akan mempertinggi prestasi kerdja, akan meningkatkan produksi dan mendatangkan kemakmuran. Oleh karena itu pemerintah berseru kepada Rakjat supaja membantu rentjana² dan tindakan² pemerintah.

Kita harus kupas propaganda jang menjesatkan ini. Propaganda ini bertudjuan untuk melemparkan beban krisis kepada kaum buruh dan Rakjat Indonesia, supaja untuk kepentingan madjikan² imperialis (modal besar asing) kaum buruh suka memperpanjang

Kewadajiban Front Persatuan Buruh

waktu kerdja, kaum buruh suka menerima upah rendah atau lebih rendah, kaum buruh suka bekerdja setengah mati guna mempertinggi prestasi kerdja, supaya kaum buruh (termasuk pegawai² negeri) menerima sadja kalau didjatuhkan "rasionalisasi" dan massa-ontslag atas dirinja, karena toh semuanya ini untuk "pembangunan nasional". Kita harus telandjangi tipuan² dari kaum imperialis dan kaki tangannja ini dengan menerangkan, bahwa produksi merosot sama sekali bukan karena tuntutan² dan aksi² kaum buruh, tetapi produksi merosot adalah bersumber pada hakmilik setjara kapitalis atas alat² produksi vital (perkebunan, pertambangan, transport, dsb.) dan disebabkan oleh adanja krisis kapitalisme jang djuga menimpa Indonesia karena Indonesia tidak memisahkan diri dari sistim kapitalisme dunia jang sudah berada dalam krisis umum jang makin mendalam dan jang sedang sekarat. Kita harus terangkan, bahwa satu²nja djalan untuk mempertinggi produksi hanjalah dengan djalan menasionalisasi alat² produksi vital dan dengan membuang tudjuan-tjari-untung setjara kapitalis dari alat² produksi tersebut. Kita wadajib mengingatkan kepada Rakjat supaya tidak terdjebak oleh rentjana² pembangunan imperialis, jang pada hakekatnja tidak lain daripada rentjana bikinlaba jang tidak terbatas dan sebagai persiapan untuk perang dunia jang baru. Kita tidak mungkin ikut didalam pembikinan dan pelaksanaan rentjana produksi, dimana sistim imperialis masih berkuasa dan sistim bikin-laba jang tidak terbatas masih tidak diganggu-gugat. Kita harus tundjukkan, bahwa djustru tjara² modal besar asing dan pemborosan oleh pemerintah itulah jang sebenarnja membikin prestasi kerdja mendjadi rendah, membikin produksi mendjadi merosot, membikin mahal harga barang dan jang menimbulkan inflasi. Rentjana² imperialis tidak bisa lain daripada menudju krisis jang lebih dalam dan menudju kemerosotan produksi jang sangat tjepat. Untuk mengatasi krisis jang makin mendalam ini sudah ada tanda² bahwa sistim kerdjapaksa mau didjalankan lagi di Indonesia. Massa-ontslag dikalangan kaum buruh dan "rasionalisasi" dikalangan tentara telah menimbulkan barisan penganggur jang hebat, dan ini telah membikin lebih merosot harga tenaga buruh, dan ini merupakan

sjarat untuk adanja kerdjapaksa. Kaum penganggur jang makin banjak djumlahnja ini bukannya diberi pekerdjaan dengan membuka lapangan industri jang luas, dan bukan diberi sokongan untuk sekedar mempertahankan hidupnja selama menunggu mendapat pekerdjaan, tetapi sebagian demi sebagian mereka dikirim sebagai kuli biasa atau dalam ikatan tentara ke-tempat² diluar Djawa, dimana tidak ada tanda² bahwa nasib mereka akan mendjadi baik. Jang terang jalah bahwa di-tempat² jang baru itu sama sekali tidak ada pembangunan jang sesungguhnya, disana tidak ada pembukaan industri² besar atau pertanian² negara jang luas. Jang mereka hadapi pada umumnja tidak beda dengan apa jang dizaman pendjadjahan Belanda dulu dihadapi oleh kuli "kontrak Deli" atau oleh kaum "kolonisasi Lampung". Pengembalian zaman "kontrak Deli" dan "Kolonisasi Lampung" dizaman "merdeka" sekarang ini dibalut dengan sembojan "untuk pembangunan nasional" atau "untuk pembangunan negara".

Kita harus djelaskan, bahwa tidak mungkin ada pembangunan nasional dan tidak mungkin ada reorganisasi produksi djika tidak dilakukan nasionalisasi atas perusahaan² vital dan djika tidak dilaksanakan industrialisasi, djika tidak dilikwidasi peraturan² kolonial, djika tidak didjalankan program Demokrasi Rakjat dan djika tidak diberikan upah serta djaminan jang lajak kepada kaum buruh. Orang² pemerintah dan madjikan² imperialis sering dan terus-menerus mengatakan, bahwa nasionalisasi perusahaan vital adalah rentjana jang terlalu umum, jang abstrak, jang tidak praktis dan tidak menguntungkan kepentingan umum, pendeknja, adalah sesuatu jang tidak mungkin dilaksanakan. Ini adalah djuga tipuan kaum imperialis dan kaki tangannja jang tidak masuk akal dan harus kita tentang keras, ini adalah propaganda imperialis dan kaki tangannja jang hendak membodohkan kaum buruh dan Rakjat.

Oleh karena itu, mengandjurkan kepada kaum buruh untuk bekerdja lebih keras dan lebih lama, untuk memproduksi lebih banjak guna rentjana² modal besar asing, dimana kaum buruh dan massa pekerdja lainnja sedang dalam perdjjuangan jang pahit untuk mengatasi tingkat hidup jang bertambah buruk, adalah andjuran

Kewadajiban Front Persatuan Buruh

jang mengorbankan kaum buruh untuk kepentingan² imperialis. Mereka jang mengandjurkan ini tidak lain daripada imperialis sendiri, kaki tangan imperialis atau orang² jang mungkin djudjur akan tetapi sudah mendjadi korban propaganda imperialis. Kita harus menelandjangi dan membuka kedok rentjana² imperialis, kita harus mengadakan perlawanan terhadap semua pukulan² imperialis dan agen²nja, dan dengan gagah berdjuaug terus supaja didjalankan nasionalisasi atas perusahaan² vital, supaja didjalankan kontrol atas keuntungan², supaja dilaksanakan upah dan djaminan sosial jang lajak, supaja didjalankan Undang² 40 djam-kerdja seminggu, dsb. sebagai gandjaran pada kaum buruh jang ambil bagian penting dalam mengorganisasi produksi. Kita harus tentang dengan keras tiap² fikiran jang mengatakan bahwa nasionalisasi dan lain²nja itu adalah tidak kongkrit, tidak praktis dan tidak menguntungkan umum. Nasionalisasi, kontrol atas keuntungan, upah dan djaminan sosial jang lajak, 40 djam-kerdja seminggu, dsb. itu adalah kongkrit, praktis dan menguntungkan umum. Jang dirugikan oleh semuanya ini hanjalah imperialis dan kaki tangannya jang sudah mendjalinkan kepentingannya mendjadi satu dengan kepentingan imperialis (kaum komprador atau kaum agen imperialis).

Orang² pemerintah sering menerangkan, bahwa negara tidak rnempunyai uang untuk melaksanakan nasionalisasi. Ini adalah keterangan jang sangat lutju dan mentertawakan. Bukankah djustru untuk mendapat uang guna mengisi kas negara perlu dilaksanakan nasionalisasi atas perusahaan² vital, djadi djangan dibalik, seolah² nasionalisasi jang membikin kosong kas negara. Dan keterangan ini merupakan selimut untuk menutupi pendirian antinasionalisasi serta menundjukkan pengertian nasionalisasi setjara kapitalis jang tidak merugikan kapitalismonopoli². Keterangan jang menjesatkan ini djuga harus ditelandjangi.

Adanja pendapat jang menganggap bahwa mempopulerkan soal nasionalisasi perusahaan vital sebagai sesuatu jang abstrak, jang tidak kongkrit, tidak praktis dan tidak menguntungkan umum, adalah pendapat reformis dan reaksioner. Pendapat demikian itu

mesti ditentang. Perdjuaan kita untuk mentjapai tuntutanbagian² (partial demands, deeleisen) haruslah dipimpin oleh pengertian Marxis jang tepat, jaitu bahwa tidak mungkin hasil tuntutan bagian bisa stabil dalam zaman krisis seperti sekarang ini. Stabilitet hanja mungkin djika kita bisa mengalahkan sama sekali semua ofensif kapitalis. Oleh karena itu, disamping menerima hasil² tuntutanbagian jang bisa sekedar mengentengkan beban kaum buruh, kita minta kepada kaum buruh supaja senantiasa waspada dan siap untuk menghadapi ofensif² kapitalis, dan supaja siap untuk terus berdjuaan guna tuntutan² pokok mereka, jaitu tuntutan nasionalisasi perusahaan² vital, kontrol atas keuntungan, upah dan djaminan jang lajak.

Dan bersamaan dengan tuntutan untuk menasionalisasi perusahaan² vital, harus kita djelaskan pada kaum buruh dan seluruh Rakjat, bahwa nasionalisasi akan tidak ada artinja djika ia dilaksanakan oleh suatu negara jang sudah seutuhnja mengabdikan diri pada monopoli² Belanda dan Amerika, karena dalam keadaan demikian nasionalisasi tidak lain daripada sesuatu jang hanja mengabdi kepentingan kapitalis se-mata². Djadi, tuntutan nasionalisasi tidak bisa dipisahkan dari perdjuaan politik untuk memisahkan negara dari modal monopoli asing. Tetapi selama keadaan politik memungkinkan, tindakan² nasionalisasi sebagai pelaksanaan tuntutanbagian daripada seluruh bangsa, mempunjai arti jang besar untuk menghidupkan kembali ekonomi jang sudah dirusak oleh restriksi² (pembatasan²) kapitalis-monopoli² dan jang sudah dibinasakan oleh pendudukan fasis Djepang dalam perang dunia kedua.

III. Keterangan Kita Tentang Kenaikan Harga Barang Dan Inflasi

Ada propaganda imperialis dan orang² pemerintah jang mengatakan, bahwa aksi² kaum buruh jang menuntut kenaikan upah adalah merugikan kepentingan nasional dan kepentingan umum, karena kenaikan upahlah jang menjebabkan naiknja harga

Kewajiban Front Persatuan Buruh

barang dan jang menjebakkan inflasi. Dengan alasan ini pula orang² pemerintah dan madjikan² imperialis menuduh gerakan kaum buruh untuk kenaikan upah sebagai gerakan a-nasional, a-sosial, dan menuduh bahwa aksi² kaum buruh untuk kenaikan upah sebagai aksi² untuk mentjapai tudjuan politik "jang tertentu". Ja, mereka djuga menuduh bahwa aksi² kaum buruh menuntut kenaikan upah serupiah atau dua rupiah sehari, atau kenaikan upah sepuluh atau duapuluh rupiah sebulan, sebagai "aksi politik", sebagai aksi "untuk merobohkan negara", sebagai aksi untuk mengadakan "coup d'etat". Tetapi mereka tidak banjak bitjara, djika ber-miljard² dollar diangkut keluar negeri oleh madjikan² imperialis sebagai keuntungan luar biasa dari mengexploitasi kekajaan alam dan tenaga Rakjat Indonesia. Mereka tidak ber-teriak² bahwa keuntungan² jang ber-miljard² inilah jang menjebakkan kenaikan harga barang dan jang menjebakkan inflasi. Tidak, malahan mereka bergiat untuk membikin berbagai Undang² dan Peraturan² guna memberi kedudukan lebih kuat pada modal besar asing di Indonesia.

Propaganda jang menjesatkan ini djuga harus kita telandjangi dan kuliti. Kita harus terangkan, bahwa djustru untuk kepentingan nasional dan kepentingan umum, djustru untuk mentjiptakan sjarat² kemakmuran bagi umum, djustru untuk itulah kaum buruh menuntut kenaikan upah. Hanja kaum buruh jang upahnja banjak bisa mengeluarkan uang banjak untuk membeli kebutuhan²nja, dan ini berarti menghidupkan sektor² lain dari masjarakat (pemilik warung, pemilik toko), pemilik restoran, tukang pakaian, toko buku, sekolah², pemilik bioskop, dokter, advokat, dsb.). Djika upah buruh sangat merosot, maka sektor² lain dari masjarakat djuga akan mengalami keambjukan. Maka itu, soal pentingnja kenaikan upah buruh tidak hanja penting untuk kaum buruh, tetapi djuga penting untuk seluruh masjarakat.

Apakah kenaikan upah buruh mesti berakibat kenaikan harga barang dan inflasi? Sama sekali tidak. Kita harus terangkan, bahwa kenaikan upah **sama sekali tidak mesti berakibat naiknja harga barang dan inflasi**. Pokoknja asal pemerintah suka menekan modal

besar asing, agar sebagian keuntungan jang bermiljard² itu bisa digunakan untuk menaikkan upah kaum buruh. Seandainya 50% sadja dari keuntungan jang ber-miljard² itu digunakan untuk kenaikan upah buruh, maka ia pasti akan memperbesar kekuatan membeli dari kaum buruh dan ini akan membawa kegembiraan bekerdja pada kaum buruh. Kegembiraan bekerdja ini akan mempertinggi prestasi kerdja, jang berarti mempertinggi produksi, dan seluruh masjarakat akan untung olehnja. Masjarakat tidak akan mengalami kenaikan harga dan tidak akan hidup dalam tjengkeraman inflasi seperti sekarang. Dengan mengambil 50% dari keuntungan modal besar asing sama sekali tidak menambah djumlah uang jang beredar. Kantor tjetak uang kertas tidak perlu kerdja extra untuk mentjetak lebih banjak uang. Dengan demikian uang jang ada tidak perlu mengalami nasib uang Djepang, dimana untuk membeli sedikit barang harus membawa uang ber-kantong². Singkatnja apa jang dinamakan inflasi, jaitu keadaan dimana uang terlalu banjak beredar, djika dibanding dengan barang jang tersedia, tidak perlu dialami oleh Rakjat Indonesia. Setjara sewadjaranja, karena ada kegembiraan bekerdja kaum buruh akan memperbesar produksi, harga barang akan mendjadi turun untuk keuntungan seluruh masjarakat. Negarapun akan mendapat keuntungan, karena 50% dari keuntungan modal besar asing pasti tidak diangkut keluar negeri, tetapi digu-nakan didalam negeri sendiri. Ini hanja satu tjontoh sadja jang menundjukkan, bahwa suatu pemerintah jang bukan pemerintah Demokrasi Rakjat, tetapi jang sedikit progresif, bisa meringankan sekedar beban Rakjat jang dengan mengurangi keuntungan modal besar asing. Tetapi ini belum berarti pemetjahan jang sempurna untuk perbaikan jang stabil atas nasib rakjat dan untuk melikwidasi sama sekali kekuasaan imperialis di Indonesia.

Djadi djelaslah, bahwa tidak adil sekali, dan djahat sekali, djika soal kenaikan harga barang dan inflasi mau ditimpakan tanggung djawabnja pada kaum buruh jang menuntut kenaikan upah serupiah atau dua rupiah. Kenapa beberapa rupiah ditangan si Amat dan si Ali bisa menjebabkan kenaikan harga barang dan inflasi, sedangkan

Kewajiban Front Persatuan Buruh

ber-miljard² dividend jang dibagikan oleh modal besar asing tidak dibikin ribut sebagai sumber kenaikan harga barang dan inflasi?

Ada lagi taktik pemerintah dan madjikan imperialis untuk tidak membenarkan kaum buruh menuntut kenaikan upah. Mereka seolah² dokter jang pintar dan memberikan obat pada kaum buruh berupa: **djandji penurunan harga**. Setjara prinsipiil kaum buruh menjetudjui penurunan harga. Bagi kaum buruh tidak ada bedanja, apakah upah mereka naik 100% atau harga barang turun 50%. Dalam dua hal ini bukankah kaum buruh bisa membeli barang dua kali lebih banjak? Kalau kaum buruh bisa membeli barang lebih banjak dengan upah Rp. 100,- djika dibanding dengan upah Rp. 150,- kaum buruh akan memilih jang Rp. 100,-. Tetapi slapakah jang prinsipil menentang penurunan harga barang? Jalah kaum madjikan sendiri, sehingga tiap² djandji pemerintah untuk menurunkan harga barang mendjadi omong kosong belaka. Oleh karena itu, usaha pemerintah untuk mengadakan richtprijis (harga antjer²) terhadap beberapa matjam barang tidak akan ada hasilnja, karena harga antjer² itu sendiri berada diluar kemampuan membeli dari Rakjat. Dengan demikian, pada hakekatnja pemerintah membiarkan harga terus membubung, tetapi disamping itu, dan ini tidak adilnja, pemerintah terus-menerus menekan kenaikan upah buruh.

Bagi kaum buruh adalah sama sadja, apakah ia mendapat kenaikan upah atau penurunan harga barang, asal sadja kedua²nja ini tidak dibebankan kepada kaum buruh dan Rakjat, tetapi diambilkan dari keuntungan modal besar asing.

Apakah dengan politik mengontrol keuntungan dan menggunakan sebagian keuntungan modal besar asing untuk kenaikan upah buruh akan berakibat "larinja modal besar asing dari Indonesia?" Tidak mesti. Dunia sudah terlalu sempit untuk modal besar bertjokol. Sebagian dari dunia dan sebagian dari umat manusia sudah membebaskan diri dari sistim kapitalisme. Tetapi seandainja modal besar asing "lari", sama sekali tidak ada alasan untuk berketjil hati. Hanja orang² jang berfikiran pitjik dan tidak

mempunyai kepertjajaan pada kekuatan nasional sendiri, hanja mereka jang sudah mendjalin kepentingannya mendjadi satu dengan kepentingan imperialis, hanja mereka jang akan merasa kehilangan djika imperialis (modal benar asing) angkat kaki dari Indonesia. Suatu pemerintah jang progresif segera akan mengambil over perusahaan² kepunjaan modal besar asing itu, segera akan menasionalisasi perusahaan² vital itu guna kemakmuran Rakjat.

Djadi teranglah, bahwa hanja fikiran kapitalis jang membenarkan "teori" bahwa kenaikan upah mesti berakibat kenaikan harga barang dan mesti berakibat inflasi. Memang, kenaikan harga barang jang tidak ada hingganya dan inflasi tidak bisa dipisahkan dengan sistim kapitalis. **Biarpun tidak ada aksi² kaum buruh jang menuntut kenaikan upah, selama perusahaan² vital belum dinasionalisasi dan tudjuan-tjari-untung setjara kapitalis dari perusahaan² vital itu belum dilenjakkan, kenaikan harga barang dan inflasi akan terus mendjadi penjakit umum dari masyarakat.**

IV. Program Demokrasi Rakjat Dan Pengusaha Nasional

Kepada klas tengah (pengusaha² nasional) harus kita djelaskan terus terang, bahwa sebgal madjikan jang hidupnya tergantung pada mengexploitasi kaum buruh, memang ada kalanja kaum buruh akan menuntut sekedar perbaikan nasib pada mereka. **Tetapi program Demokrasi Rakjat sama sekali tidak hermaksud melikwidasi mereka dengan djalan menasionalisasi perusahaan² mereka, malah program Demokrasi Rakjat mau memberi kedudukan jang stabil pada mereka untuk memperbesar tenaga produktif masyarakat, sebagai sjarat menudju kemasjarakat sosialis.** Djustru program Demokrasi Rakjat bertudjuan mempertahankan hak-milik perseorangan dari pengusaha² nasional. Adalah djuga mendjadi kewadajiban kaum buruh untuk membantu perdjuangan pengusaha² nasional guna mendapatkan hak² mereka jang sewadjaranja, guna membantu mereka dalam perlawanannya terhadap monopoli imperialisme dan terhadap penghantjuran atas dirinja oleh ekonomi perang. Kaum buruh Indonesia jang jakin,

Kewajiban Front Persatuan Buruh

bahwa tudjuan sosial, ekonomi dan politiknya hanya bisa dilaksanakan dalam masyarakat yang damai, dengan sekuat tenaga berkewajiban membantu pengusaha² nasional dalam mewujudkan ekonomi damai di Indonesia, yaitu ekonomi dimana produksi dan distribusi ditudjukan pada barang² kebutuhan Rakyat (beras, textile, sepatu, sepeda, dsb.) dan tidak seperti sekarang, dimana produksi dititik-beratkan pada bahan² keperluan perang (timah, karet, bauksit, dsb.). **Hanya dengan adanya perubahan ekonomi perang menjadi ekonomi damai, dapat diadakan perubahan atas tingkat hidup Rakyat yang sekarang makin lama makin merosot.** Kaum buruh Indonesia berkewajiban menjokong tiap usaha pengusaha² nasional untuk membebaskan diri dari ikatan² imperialis Belanda dan Amerika, dan membantu perjuangan mereka untuk mentjapai adanya perdagangan bebas, terutama perdagangan bebas dengan negeri² Demokrasi Rakyat dan Soviet Uni untuk mendapatkan barang² yang lebih murah harganya dan untuk mendapatkan barang²-modal (kapitaalgoederen), sebagai syarat permulaan bagi Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhannya akan barang² yang diperlukan oleh Rakyat.

Kenjataan² diatas adalah bertentangan dengan propaganda madjukan² imperialis dan kaki tangannya, dan propaganda ini pada hakekatnya tidak lain daripada usaha kaum madjukan imperialis untuk menutupi tudjuan mereka yang sesungguhnya. **Karena justru imperialismelah yang terus-menerus melikwidasi kelas tengah, agar dengan demikian mereka bisa memusatkan atau memonopoli seluruh kehidupan ekonomi didalam tangan klikenya sendiri.** Dan milik imperialis inilah yang telah dan, sedang melikwidasi kelas tengah Indonesia. Oleh karena itu pula program revolusi Demokrasi Rakyat menghendaki adanya kerdjasama antara seluruh golongan Rakyat, termasuk pengusaha² nasional, untuk menghantjurkan musuh bersama, yaitu modal besar asing dan sisa² feodalisme, untuk menggagalkan ekonomi perang imperialis dan untuk membangunkan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pengalaman kaum pengusaha nasional Indonesia dalam beberapa

tahun belakangan ini menundjukkan, bahwa pemerintah Indonesia jang mendjadi komprador modal besar asing tidak mungkin sungguh² berdiri difihak pengusaha nasional. Untuk menutupi sifat kompradornja, ada kalanja pemerintah Indonesia terpaksa "membantu" sebagian jang sangat ketjil dari pengusaha nasional, tetapi disamping itu modal besar asing diberi keleluasaan sepenuhnja untuk menghantjurkan dan menelan perusahaan² nasional (seperti industri tenun, rokok, batik, pertjetakan, perdagangan import-export, perusahaan pelajaran, perkebunan karet Rakjat, perusahaan penangkapan ikan laut, dsb.). Semuanja ini menundjukkan, bahwa kaum pengusaha nasional tidak boleh lagi mempunjai illusi akan mendapat perlindungan jang sungguh² dari pemerintah komprador, tetapi mereka harus menentukan sikapnja jang benar, jaitu sikap menentang politik komprador dan memihak perdjungan Rakjat Indonesia jang bertudjuan menghantjurkan imperialisme dan menegakkan sistim Demokrasi Rakjat, jaitu sistim jang mendjamin stabilitet kedudukan pengusaha² nasional.

V. Soal Serikatburuh-I Reaksioner Dan Arbitrasi Pemerintah

Takut akan kekuatan klas buruh jang makin berkembang, takut akan pemogokan² dan yakin bahwa dengan tindakan² kekerasan serta dengan undang-undang jang berbau fasis tidak akan dapat menghantjurkan klas buruh, mereka mendirikan serikatburuh² kuning sebagai persiapan menudju front buruh setjara Hitler. Dengan melemparkan tuduhan² pada SOBSI jang mendjemukan dan sama sekali tidak masuk akal - seperti tuduhan SOBSI anasional, SOBSI dikendalikan oleh kekuasaan asing, SOBSI organisasi "komunis" dsb. - mereka memainkan rol anti-mogok, rol memetjah-belah, rol anti-komunis, rol anti-sosialisme, rol anti-Demokrasi Rakjat, jang pada hakekatnja tidak lain menundjukkan bahwa mereka mendjalankan rol anti-klas-buruh dan anti-Rakjat. Pada hakekatnja, merekalah jang didikte oleh kekuasaan asing,

Kewadajiban Front Persatuan Buruh

oleh imperialis Belanda, Amerika dan Inggris. Mereka adalah tengkulak pengatjau pemogokan dan gangster² untuk menteror klas buruh. Pemimpin² serikatburuh reaksioner (kuning) memegang rol penting dalam tindakan² kedjam seperti dalam Razzia Agustus, dan, mereka mengadakan kerdjasama jang erat dengan kepolisian dan "tuan² besar" dan mereka bertindak sebagai spion²nja.

Kedok serikatburuh kuning harus dibuka didalam tiap² rapat kaum buruh dan harus dibangkitkan kemarahan kaum buruh terhadap pengatjau² ini. Tiap² aksi mereka menentang pemogokan, tiap² usaha mereka untuk menakut-nakuti kaum buruh, tiap² usaha mereka untuk memetjah-belah dan tiap² pengchianatan mereka harus dibuka kedoknja tepat pada waktunja, agar dengan demikian mereka jang tidak djudjur itu tidak mempunyai akar dimassa.

Dimana ada serikatburuh kuning jang sedikit-banjak mempunyai pengaruh pada massa, hendaklah pada pusat atau tjabang serikatburuh demikian itu ditawarkan untuk mengadakan front bersama menghadapi madjikan khusus tentang tuntutan disekitar upah, sjarat² hidup dan njatakan kesediaan kita untuk membantu mereka dalam perdjjuangan melawan madjikan. Adanja front bersama melawan madjikan adalah didikan bagi kaum buruh jang akan menjedarkan mereka akan perlunja hanja ada satu Vaksentral untuk seluruh massa kaum buruh di Indonesia.

Tetapi disamping menawarkan front bersama dengan serikatburuh kuning, djangan dilupakan pentingnja membuka kedok pemimpin² serikatburuh-serikatburuh kuning jang tidak djudjur. Untuk mendapat pengaruh, ada kalanja pemimpin² serikat buruh kuning terpaksa memimpin suatu pemogokan. Tetapi karena tidak didasarkan tjinta dan pengabdian jang sepenuh djiwa pada kepentingan klas buruh, pemimpin² palsu demikian, akan segera terbuka kedoknja. Dengan adanja pimpinan jang baik dari pemimpin buruh jang djudjur, maka kaum buruh akan segera dapat mengetahui, bahwa pemimpin² serikatburuh kuning itu memimpin sesuatu pemogokan hanja karena desakan jang makin lama makin keras dari anggota² serikatburuh. Oleh karena itu, kewaspadaan

massa kaum buruh terhadap pemimpin² jang tidak djudjur harus dibangkitkan, dan dimana terbukti pemimpin serikatburuh jang demikian itu sudah mendjual diri pada madjikan atau pemerintah, hendaklah tepat pada waktunja diterangkan pada massa kaum buruh.

Diatas se-gala²nja, se-kali² djangan ditanamkan pada massa kaum buruh suatu illusi (fikiran jang bukan²) bahwa "Panitia Penjelesaian" (badan arbitrase) jang dibentuk oleh pemerintah burdjuis akan berbuat adil kepada kaum buruh. Kita se-kali² tidak boleh mempunjai illusi, bahwa dizaman krisis ekonomi seperti sekarang ini perdjungan jang sengit antara kapital dan buruh bisa diselesaikan setjara adil oleh "Panitia² Penjelesaian" sematjam itu. Akan tetapi hendaklah diingat, apa jang bagi kaum Komunis sudah terang tidak beres dan hanja tipuan belaka, seperti "Panitia Penjelesaian" ini, massa kaum buruh masih memerlukan pengalaman untuk mengerti hal² ini. Perdjungan se-hari² dari kaum buruh akan membuktikan, bahwa "Panitia Penjelesaian" bukan untuk kepentingan kaum buruh tetapi untuk kepentingan madjikan dan pemerintah.

VI. Front Buruh Dengan Kemerdekaan Nasional Dan Perdamaian

Dalam "Djalan Baru" (Resolusi CC PKI bulan Agustus 1948) diterangkan: **Tiap² Komunis harus jakin benar², bahwa dengan tidak adanja Front Nasional kemenangan tidak akan datang.** Oleh karena itu adalah kewadjiban Partai Komunis Indonesia dan serikatburuh² untuk ambil bagian jang paling penting, paling besar dan paling sungguh² dalam perdjungan membela kepentingan² kaum buruh. Perdjungan ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak hanja kaum buruh sadja jang mendapat kemenangan jang gilang-gemilang; tetapi djuga supaja bisa memberikan inspirasi kepada klas² dan golongan² lain, kepada kaum tani, pengusaha² ketjil dan sedang, golongan intelektual serta golongan Rakjat lainnja, supaja lebih menaruh kepertjajaan akan

Kewadajiban Front Persatuan Buruh

kemenangan pasti dan kemenangan bersama atas imperialisme, feodalisme dan burdjuasi komprador (burdjuasi agen imperialis. Perdjungan membela kepentingan kaum buruh harus mempersatukan seluruh kaum buruh dibawah pimpinan organisasi² buruh, dimana kaum Komunis harus membuktikan pembelaannya yang sungguh² terhadap kepentingan² ekonomi dan politik dari kaum buruh.

Front buruh harus merupakan front yang terkuat, yang paling bersatu, paling maju dan paling sadar dalam front persatuan nasional yang luas. Front buruh dan Front tani harus ambil bagian yang terpenting didalam perdjungan untuk menggalang front persatuan nasional (front demokrasi atau front pembela tanah air), jaitu persekutuan daripada seluruh Rakjat Indonesia untuk melaksanakan tjita² politiknya, dimana sumber kekuasaan ada pada Rakjat dengan terbentuknya Republik Demokrasi Rakjat. Dalam front persatuan nasional ini kaum buruh dan kaum tani harus menjadi basisnya.

Front persatuan nasional adalah syarat mutlak untuk mentjapai kemerdekaan nasional. Kemerdekaan nasional adalah syarat guna perkembangan sesuatu bangsa. Perdamaian, perbaikan dan kemajuan hanya bisa ditjapai oleh bangsa Indonesia dengan melalui kemerdekaan nasional. Perdjungan nasional untuk melepaskan diri dari imperialisme Belanda dan Amerika tidak bisa dipisahkan dengan perdjungan melawan reaksi, perdjungan untuk perdamaian, untuk demokrasi dan untuk sepiring nasi. Djelaslah, bahwa hak² dan kebebasan bagi kaum buruh, jaitu: hak mendapat pekerjaan, bebas dari antjaman pengangguran, hak mendapat bajaran penuh, bebas dari perbedaan ras dan djenis, bebas dari penghisapan kapitalis dan hak atas kebudayaan, hanya bisa ditjapai apabila didahului oleh adanya kemerdekaan nasional yang sedjati. **Djadi kaum buruh tidak mungkin merdeka dan mendapat semua hak²nja djika tidak ada kemerdekaan nasional.**

Sekarang ini massa kaum buruh Indonesia belum berada dibawah satu pimpinan. Sebagian besar berada dibawah pimpinan SOBSI,

sedangkan bagian² lainnja berada dibawah pimpinan kaum nasionalis (seperti GSBI) dan kaum sosialis (seperti POB). Sebagian jang sangat ketjil berada dibawah pimpinan orang² trotskis (SOBRI) atau klik² lain jang sengadja dibajar oleh imperialis untuk memetjah-belah dan mengadu-domba massa kaum buruh serta untuk merigadakan rintangan² dalam perkembangan gerakan kaum buruh dengan mendjalankan kegiatan² polisionil dan spionase. Djuga ada golongan jang tidak djudjur jang menggunakan agama untuk memetjah-belah gerakan buruh dengan mendirikan serikatburuh² jang "berdasarkan agama" (seperti SBII, Serikat Buruh Katolik). Keadaan ini tentu menimbulkan kemarahan dikalangan kaum agama jang djudjur.

Mengingat kenjataan bahwa kaum buruh Indonesia belum bersatu dengan bulat dibawah satu pimpinan jang djudjur dan militant, sedangkan usaha² reaksi semakin keras untuk menghantjurkan gerakan buruh, maka lebih² dari waktu jang sudah², sekarang dibutuhkan adanja kesatuan² aksi didalam tiap² perdjjuangan kaum buruh. Untuk ini kaum buruh dari berbagai serikatburuh (SOBSI dan non-SOBSI) bisa mengadakan Kongres Upah jang khusus untuk memperbintjangkan soal² upah, bisa mengadakan Komite Makanan Rakjat, bisa mengadakan Komite Kaum Penganggur, bisa mengadakan Pernyataan Bersama tentang sesuatu atau beberapa soal, bisa mengadakan front buruh didalam Dewan Perwakilan Rakjat atau perwakilan² lainnja, bisa mengadakan Sekretariat Bersama untuk melaksanakan suatu fusi, dsb.

Kesatuan aksi bisa diadakan ketika baru menghadapi perdjjuangan atau ketika perdjjuangan itu sedang berdjalan. Kesatuan perdjjuangan seluruh kaum buruh ini pasti bisa ditjapai, karena setjara objektif perdjjuangan buruh selandjutnja, dalam melawan akibat² krisis ekonomi jang semakin memuntjak, menghendaki adanja persatuan ini. Krisis tidak hanja menimpa segolongan buruh sadja, tetapi ia menimpa semua golongan buruh, tidak perduli apakah ia dipimpin oleh kaum Komunis, oleh Nasionalis, oleh Sosialis atau oleh lainnja, tidak perduli apakah ia beragama Islam, Katolik, Protestan atau lain²nja. Perdjjuangan buruh jang makin

Kewajiban Front Persatuan Buruh

sengit dalam membela kepentingannya pasti akan membukakan kedok badut² dan tengkulak² dalam gerakan buruh. Pemimpin² buruh yang jujur, terutama kaum Komunis, diwajibkan supaya pandai menjalankan taktik yang tepat (correct) dalam menarik tiap golongan kedalam perjuangan bersama dari kaum buruh untuk menghadapi madjikan. Kesatuan perjuangan sematjam ini akan memberikan pelajaran yang sangat baik kepada kelas buruh tentang rol chianat daripada pemimpin² serikatburuh kuning dan tentang kebutuhannya akan serikatburuh² dan akan satu Vaksentral yang revolusioner.

Sebagaimana dikatakan diatas, front buruh diwajibkan ambil bagian yang terpenting, didalam usaha menggalang front persatuan nasional. Dalam hal ini sungguh² harus diperhatikan agar front buruh tidak terisolasi dari golongan² Rakjat lainnya. Terisolasi berarti bahaya besar bagi seluruh perjuangan buruh. Djika gerakan buruh terisolasi, pemerintah reaksioner dan imperialis akan mudah bertindak untuk menghantjurkan gerakan kaum buruh dengan terang²an dan dengan kedjam, dan ini adalah permulaan dan persiapan untuk menghantjurkan seluruh gerakan Rakjat. Dan djika ini terdjadi, fasisme meradjalela kembali di Indonesia. Djadi, dapat atau tidaknya bahaya fasisme ditjegah, adalah tergantung dari perlawanan dan kekuatan front buruh dan tergantung dari hubungan front buruh dengan kelas² lain (terutama kaum tani) dan dengan front² lain (front pemuda, front pelajar, front wanita, front kebudayaan, front perdamaian, dsb.). Untuk berhasilnya aksi² kaum buruh dan untuk memperkuat front persatuan nasional, dalam aksi² kaum buruh harus senantiasa diingat tiga sjarat² sebagai berikut:

- 1) supaya tiap² aksi kaum buruh dibenarkan dan masuk akal sebagian besar dari Rakjat sehingga mendapat simpati dan sokongannya;
- 2) supaya tiap² aksi kaum buruh dimulai dimana keadaan sedang baik untuk massa dan kemungkinan mendapat sukses adalah besar;
- 3) supaya tiap² aksi kaum buruh dimulai dan diachiri pada titik

jang paling tepat dan saat jang paling baik, ia tidak boleh merupakan perjuangannya melawan musuh jang tidak ada ketentuan kapan selesainya.

Dalam usaha memenuhi sjarat² ini kaum buruh Indonesia sudah mempunyai berbagai pengalaman dan pelajaran jang baik. Kaum buruh Indonesia sudah mengalami pemogokan dari lebih-kurang 700.000 buruh perkebunan dibawah pimpinan SARBUPRI pada pertengahan tahun 1950. Pemogokan raksasa ini telah berakhir dengan kemenangan disebabkan tepatnya tuntutan, tepatnya memilih waktu pemogokan, mendapat bantuan kaum tani dan tindakan SOBSI jang tepat pada waktunya. Kaum buruh Indonesia sudah mengalami pemogokan buruh kendaraan bermotor dalam aksinya melawan GAPO (Gabungan Perusahaan Otobis) bulan Djuli 1951, dibawah pimpinan SBKB. Aksi ini mendapat kemenangan karena tepat tuntutannya, tepat waktu mulainya dan tepat pada waktu mengakhirinya. Pemogokan ini tidak hanya dapat simpati dan sokongan dari golongan buruh lain, tetapi juga dapat simpati dan sokongan pengusaha² otobis nasional. Tetapi disamping itu kaum buruh Indonesia juga mempunyai pengalaman² jang pahit, seperti pemogokan buruh Cordesius di Djakarta pada permulaan tahun 1950, pemogokan buruh kapal dan pelabuhan di Belawan dalam tahun 1951, dll. Pemogokan² ini tidak memenuhi sjarat² diatas, oleh karena itu ia gagal dan menyebabkan terisolasinya perjuangan² buruh itu dari massa buruh lainnya dan dari Rakjat banjak. Apa jang disebutkan disini hanya beberapa diantara pengalaman buruh Indonesia jang banjak itu Disamping ini masih ada lagi pengalaman² buruh pertjetakan dibawah pimpinan SBPI, pengalaman² buruh minjak kelapa dibawah pimpinan SARBUMIKSI, pengalaman buruh gula dibawah pimpinan SBG, pengalaman buruh angkutan udara dibawah pimpinan SERBAUD, pengalaman buruh minjak dibawah pimpinan PERBUM, dan banjak lagi pengalaman² jang baik maupun jang tidak baik, tetapi jang ke-dua²nja adalah pelajaran jang berharga bagi kaum buruh Indonesia. Dan tidak boleh dilupakan, bahwa kaum buruh Indonesia mempunyai pengalaman jang baik juga dalam menuntut hadiah lebaran dan

Kewadajiban Front Persatuan Buruh

gratifikasi.

Dalam mengemukakan dan membela kepentingan² kaum buruh dalam perjuangan se-hari², kita harus memimpin aksi² sedemikian rupa sehingga klas buruh menjadi bersatu sebagai satu klas, sedar akan tanggung-djawab politiknja dalam perjuangan melawan susunan masyarakat jang katjau sekarang ini dan berdjung untuk negara Demokrasi Rakjat, sedar bahwa ia mesti memimpin perjuangan dalam front persatuan nasional menuju kemenangan jang gemilang sebagai sjarat untuk menjjamin perdamaian dunia jang abadi.

Untuk memenuhi rentjana perangnja kaum imperialis makin lama makin hebat menguras kekajaan alam dan tenaga Rakjat Indonesia. Upah riil dari kaum buruh makin lama makin merosot. Guna menindas perlawanan kaum buruh jang menuntut kenaikan upah, pemerintah RI-KMB melakukan tindakan² fasis terhadap gerakan klas buruh. Dengan demikian djelaslah bahwa perjuangan untuk perdamaian dunia, untuk sepiring nasi dan untuk kemerdekaan nasional adalah Perdjungan jang saling berbubungan, jang satu dengan lainnja tidak mungkin dipisahkan. Oleh karena itu adalah djuga kewadajiban klas buruh jang terpenting untuk ambil bagian jang sungguh-sungguh didalam perdjungan untuk perdamaian dunia jang abadi, dan terutama untuk berdjung guna terlaksananja Pact Perdamaian Lima Besar (Inggris, Perantjis, Soviet Uni, Amerika Serikat dan RRT).

Dalam keadaan sekarang, dimana Imperialis Amerika makin lama makin dalam menjampuri soal² dalam negeri Indonesia, pertumbuhan demokrasi makin lama makin sangat tertekan. Sampai² kepada demokrasi parlementer tidak terdjamin di Indonesia. Tanda² jang terpenting daripada demokrasi parlementer, jaitu mempersoalkan soal² umum setjara terbuka, makin lama makin tidak nampak. Soal² umum banjak dibtjarakan hanja diantara dan oleh beberapa gelintir orang² pemerintah dengan wakil² Amerika di Djakarta (misalnja "bantuan" sendjata Amerika untuk polisi Indonesia, MSA, dll.). Keadaan ini semuanja, dan

dibuktikan pula oleh Razzia Agustus (1951), menundukkan bahwa ada usaha jang keras dari fihak reaksi untuk memfasiskan sistim pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, klas buruh, sebagai klas jang paling maju, jang paling teguh organisasinja, jang menempati kedudukan penting dalam produksi, berkewadajiban untuk memelopori perdjuaan seluruh Rakjat dalam melawan bahaya fasisme jang mengantjam seluruh kehidupan Rakjat Indonesia.

Oleh karena itu adalah kewadajiban jang sangat penting untuk mempertahankan dengan sungguh² dan dengan sengit tiap² hak dan tuntutan kaum buruh dari serangan² reaksi jang makin kurang adjar. Dan senantiasa harus didjaga agar tiap² perdjuaan kaum buruh tidak terisolasi dari seksi² lain dari kaum buruh dan dari seluruh Rakjat. Dimana keadaan mengizinkan harus diadakan propaganda besar²an tentang hak² dan tuntutan² kaum buruh, dan tepat pada waktunja mengadakan serangan² kembali pada propaganda² jang merusak dari pemerintah dan dari kaum imperialis jang bermaksud menarik simpati Rakjat guna memisahkan kaum buruh dari golongan Rakjat lainnja. Djika propaganda² jang merusak ini tidak segera dibantah dan sebagian Rakjat untuk sementara mempertjajanja, maka ini berarti menjerahkan inisiatif pada lawan.

Untuk bisa menunaikan kewadjabannja, seksi² jang sudah militant dari klas buruh harus membersihkan diri dari penjakit² sektarisme dan dari sembojan "kiri" jang kosong. Sektarisme dan slogan² "kiri" jang kosong jang tidak disokong oleh massa luas dari kaum buruh tidak hanja membantu lawan dan pemetjah² klas buruh, tetapi ia djuga merupakan rintangan dalam usaha mempersatukan klas buruh. Orang² jang sektaris dalam teorinja menerima keperluan untuk bersatu, keperluan guna bekerdja untuk itu, sebab mereka mesti menerima kenjataan; tetapi apabila sudah dalam pekerdjaan se-hari², penerimaan mereka setjara teori itu, tidak nampak dalam prakteknja. Oleh karena itulah, sektarisme adalah penjakit jang terus-menerus dan dengan sengit mesti dibasmi. Hanja dengan lenjapnja sektarisme, seksi² jang sudah militant dari klas buruh

Kewadajiban Front Persatuan Buruh

bisa menarik massa kaum buruh yang masih terbelakang, dan bisa menarik seluruh Rakyat dalam perjuangan untuk perdamaian dan kemerdekaan nasional.

Djelaslah, bahwa sejalan dengan perjuangan membela kepentingan² se-hari², kelas buruh adalah kampiun dalam membela kepentingan seluruh Rakyat, kampiun dalam perjuangan kemerdekaan dan pembela perdamaian dunia. Kaum buruh mengorganisasi aksi² politik setjara besar²an untuk melawan tiap² tindakan yang tidak adil terhadap kaum buruh sendiri, terhadap kaum tani, terhadap pemuda, terhadap pelajar, intelektual dan terhadap golongan² lain dari Rakyat. Kaum buruh adalah pemuka dan organisator dalam perjuangan untuk membatalkan persetujuan KMB yang djahat itu, untuk memasukkan Irian barat kedalam wilayah Republik Indonesia, untuk menentang didjalankannya Embargo terhadap negeri² demokrasi, untuk menentang persetujuan San Francisco dan MSA yang didikte oleh Amerika itu, dsb.

Dengan melalui aksi² solidaritet, melalui pemogokan² simpati dan lain² bentuk aksi politik yang bisa difahamkan, yang dapat simpati dan disokong oleh massa yang luas, kaum buruh Indonesia akan membadjakan kesatuan berdjung dari massa, dan lambat laun akan tampil kemuka sebagai pembela hak² dan kebebasan demokrasi, akan tampil sebagai kampiun perdamaian, sebagai pemimpin, sebagai djuru mempersatukan seluruh golongan Rakyat dan sebagai pembangunan front persatuan nasional.

Demikianlah kewadajiban front persatuan buruh kita.

Djakarta, 1 Maret 1952.

Central Comite
Partai Komunis Indonesia